Jalan Terjal Pemberantasan KORUPSI

Edisi 2020 Dilengkapi Dengan Contoh - Contoh Kasus

Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hum,

Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi

Oleh : * Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.HUM

Ed. Revisi., Cet. I.- Makassar

PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA

vii, 385 hal. : 23,5 x 16,5 cm

ISBN: 978-9025-49-4

Hak Cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin foto copy, tanpa izin penerbit.

Cetakan Pertama, 2006 PT Umitoha Ukhuwah Grafika

Cetakan Kedua, 2009, KRETAKUPA Print, Makassar

Cetakan Ketiga 2019, PT Umitoha Ukhuwah Grafika

Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi

Hak Penerbit pada PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, Makassar
Lay Out & Desain Cover : *Nur Diana, SE.*

Dicetak oleh percetakan : PT. UMITOHA, Makassar
Isi diluar tanggungjawab percetakan

PT. UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA

Jl. Abdullah Dg. Sirua No. 264 C Telp. 0411-436974
Makassar 90231

Anggota IKAPI, Nomor : 017/SSL

JALAN TERJAL PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh:

*** Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.HUM**

**Penerbit PT Umitoha Ukhuwah Grafika
Makassar, 2020**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, telah lama sekali mencoba menulis beberapa perkembangan tentang tindak pidana korupsi, Dan kini sudah dapat direalisasikan, walaupun banyak kendala yang harus dihadapi, termasuk harus keluar dari jabatan yang masih baru kami emban beberapa waktu lalu, rela untuk ditinggalkan karena ingin memfokuskan diri dalam menulis, termasuk penyelesaian buku ini.

Buku tentang **Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi** ini, edisi kedua di mana uraiannya lebih diperluas tentang beberapa hal, terutama dengan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari segi regulasi seperti adanya undang-undang KPK yang baru tahun 2019, juga dengan fenomena tindak pidana korupsi yang semakin kompleks. Itulah sebabnya tulisan dalam buku ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan hukum terkait tindak pidana korupsi.

Berbagai fenomena kontroversi/kendala penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi di tanah air. Misalnya, mereka yang terkait tindak pidana korupsi lari ke luar negeri, ada juga tetap meraja lela di tanah air tetapi sulit ditemukan dan dijerat. Terutama jika si terduga itu termasuk dalam kalangan elit politik atau ada kaitannya dengan petinggi-petinggi partai politik.

Itulah sebabnya, mungkin ada yang berkata, bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyadarkan bangsa ini agar tidak

melakukan korupsi. Saat ini, ada lagi upaya pencegahan secara dini agar Perguruan Tinggi (terutama fakultas hukum) memasukkan hal korupsi dalam kurikulum, sehingga muncullah mata kuliah "Pendidikan Anti Korupsi". Masalahnya sekarang ialah, korupsi itu terjadi bukan di kalangan mahasiswa, tetapi oleh kalangan elit-elit bangsa. Jika demikian, di mana letak problematika-nya? Apakah kondisi nasional bisa kembali normal tanpa korupsi? Kita optimis bahwa nanti suatu saat bisa.

Pada adisi ketiga ini tindak pidana korupsi digambarkan secara ekstensif seperti korupsi dikaitkan dengan korporasi, administrasi dan victims, termasuk juga kaitannya dengan kejahatan cyber dengan sarana IT sekalipun dalam bentuk contoh yang sederhana tetapi faktual.

Semogalah buku yang sampai di tangan para pembaca (terutama kalangan mahasiswa S1 sampai tingkat doctoral), kendati sangat sederhana, tetapi bisa menjadi bacaan yang inspiratif tentang apa dan bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia dewasa ini.

Makassar, 27 Februari 2020

Penulis:

Dr. Kamri Ahmad, SH. M.Hum, Dosen FH-UMI, Lektor Kepala
(Associate Professor)

DAFTAR ISI

Halaman

I.	PENDAHULUAN	1
II.	PENGERTIAN KORUPSI	3
	1. Secara Sosiologis	4
	2. Menurut Makna Yuridis	8
	3. Tipe-tipe Pengertian Korupsi	10
	4. Subyek Tindak Pidana Korupsi	14
	5. Gratifikasi	16
III.	SINERGITAS PEMBERANTASAN KKN	20
	A. Kompleks dan Populernya KKN	22
	B. Metode Elaborasi	23
	C. Kendala - kendala	25
IV.	TAFSIR VIKTIMOLOGIK KENAIKAN TARIF	27
	A. Kerangka Dasar	28
	B. Ukuran Kebijakan Publik	30
	C. Analisis Viktimologik	31
	D. Keadaan Yang Rampat	32
	E. Pemberantasan Korupsi Kehilangan Kontak	33
V.	MORAL-KEADILAN VS AMBISIUS INTERES	36
	A. Kemungkinan Spekulasi	38
	B. Hukum Moral vs Sikap Politik	39

BAB VI	PIDANA MATI DAN KORUPSI DI	
	INDONESIA	42
A. Pidana Mati		43
B. Pro-Kontra		49
C. Dialektika Pidana Mati dan HAM		52
D. Pidana Mati Bersyarat		53
E. Penutup dan Saran		53
F. Daftar Bacaan		56
I. Pentingnya Integritas Moral Dalam Penegakan Hukum Membangun Keteraturan		58
II. Pemberantasan KKN Masih Sebatas Retorika		77
III. Politik Hukum Pidana Berbasis Ekonomi Kerakyatan		87
IV. Otonomi Daerah dan Rasa Keadilan Rakyat		97
V. KPPU Perekat Demokratisasi Ekonomi		99
VI. Kriminalisasi Korupsi?		
KRIMINALISASI KPK		110
Daftar Pustaka		121
CRIME BY INSIDER LEGISLATIONS		173
GRAND CORRUPTION, POLITICAL CORRUPTION, DAN NATIONAL INTEREST		182
KEJAHATAN KORPORASI MODEL VOC		188
KEJAHATAN PERBANKAN/KORPORASI		191
Contoh Memori Kasasi		207
LAMPIRAN UUD RI 1945		235

BAGIAN PERTAMA

I

Pendahuluan

Pemahaman masyarakat tentang korupsi ternyata sangat beragam. Bukan hanya orang awam, tetapi juga kalangan pakar dan praktisi.

Keragaman pemahaman itu salah satu pengaruhnya adalah terkait dengan alam pikiran konseptualnya. Misalnya, seorang pakar ilmu administrasi negara memahami korupsi itu dari sudut pandangan administrasi negara. Bahkan ada yang mengklaim, bahwa "korupsi" adalah bagian dari hukum administrasi negara dengan alasan, bahwa korupsi menyangkut kekuasaan dan administrasi negara. Seorang advokat akan melihat pengertian korupsi itu secara terbalik dengan jaksa penuntut umum. Demikian halnya dengan orang awam, akan memaknai korupsi itu dari sudut pandang, bahwa segepok uang negara telah diambil oleh seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya sehingga merugikan keuangan negara.

Oleh sebab itu, menyamakan persepsi tentang pengertian korupsi, adalah sesuatu yang penting karena di situlah dibutuhkan batasan-batasan yang dapat dijadikan ukuran oleh semua pihak. Tanpa batasan pengetahuan korupsi, akan membuka peluang terjadinya penafsiran secara ekstensif semua orang yang justru hanya membuka permasalahan baru yang tidak menyelesaikan masalah.

Undang-undang tidak pidana korupsi sendiri dibentuk oleh negara untuk mengantisipasi pencegahan kerugian keuangan serta perekonomian negara. Atau jika terjadi korupsi, maka

sedapat mungkin lembaga peradilan korupsi dapat mengupaya-kan pengembalian keuangan negara yang biasa disebut uang pengganti. Karena berdasarkan pemantauan/survei masyarakat internasional, Indonesia sudah terbilang sebagai negara terkorup di dunia. Oleh sebab itu, aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi sudah pasti sangat dibutuhkan.

Seperti yang sudah diketahui oleh halayak ramai, bahwa ternyata korupsi tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga dapat melumpuhkan pembangunan nasional suatu negara, serta menyengsarakan rakyat. Dikatakan menyengsarakan rakyat, karena semua uang yang dikorupsi tersebut pada akhirnya ditanggung oleh rakyat melalui pembayaran pajak dan lain-lain. Itulah sebabnya, ada yang menilai bahwa korupsi dapat dikatakan melanggar HAM masyarakat. Bahkan kini ada juga jenis Tindak Pidana Korupsi sebagai embrio besar dari korupsi. Embrio baru itu adalah *money politic*. Penulis sebut ini sebagai embrio baru tindak pidana korupsi karena ada penyuapan kepada banyak pemilik kuasa yang akan menyalurkan suaranya baik dalam pilkada maupun dalam pilpres. Jenis ini belum banyak dikaji oleh kalangan pakar hukum pidana.

Dalam buku ini juga disisipkan contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari pembahasan untuk menggambarkan tindak pidana korupsi in-emcrito

Riwayat Penulis

Buku tentang Pengantar Hukum Indonesia ini, merupakan buku yang penulis tulis yang telah dipersiapkan agak lama, sedikit berbeda nuansa pembahasannya dengan buku-buku pengantar Hukum Indonesia lainnya yang disebut Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI), sekalipun buku-buku PTHI itu tetap juga menjadi bacaan penulis dan beberapa hal baru.

Buku ini dihajadkan sebagai pengantar bacaan bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum yang merefleksikan suasana hukum ala Indonesia tentang pelajaran-pelajaran dasar dari hukum selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum. Namun perlu diketahui bahwa buku ini bersifat pengantar untuk masuk pada ranah atmosfir jagad raya hukum yang amat luas lagi. Artinya, buku ini merupakan pemahaman awal guna mengenal ranah hukum secara spesifik dan khas seperti hukum pidana, administrasi neraga, hukum tata Negara dan hukum perdata dan lain-lain. Oleh sebab itu, dapat juga dibaca oleh mahasiswa tingkat lanjutan dalam hal ini S2 dan S3 sebagai referensi.

Kamri Ahmad (lahir di Sidrap, 27 Desember 1959), menempuh pendidikan SD, Madrasah Tsanawiah, Aliah di Baranti, Sidrap, kemudian pada Fakultas Hukum (SH) Universitas Muslim Indonesia Makassar 1989, melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum (S2) UNDIP Semarang 1997, dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNDIP 2007 dalam konsentrasi Sistem Peradilan Pidana. Dosen pada Fakultas Hukum UMI Makassar sejak tahun 1990 – sekarang. Jabatan Lektor Kepala, IV.c tahun 2008.

Sebagai Dosen di S1, dan S2, S3 Pascasarjana UMI, Penulis pernah mengajar sebagai dosen luar biasa di IAIN Alauddin (kini UIN) Makassar, baik S1 maupun S3 antara tahun 1999 – 2003, 2009-2010, juga di Unismuh Bau-Bau, Palu, dan Universitas Gorontalo. Di samping itu, penulis juga berprofesi sebagai Advokat sejak 2000 hingga sekarang yang tergabung dalam organisasi AAI dan PERADI.

Penulis kedua ialah Andi Khaedhir K. Petta Lolo, lahir di Semarang, 10 Februari 1995, dan lulus S1 UIN Makassar Mei 2017, S2 Program Ilmu Hukum Pascasarjana UMI 2018.

ISBN 978-602-8828-66-6